

ABSTRAK

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Butom merupakan salah satu KPI yang terdapat di Kawasan Rebana, Provinsi Jawa Barat. Penetapan KPI Butom telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018-2038. Namun regulasi industri pada Perda tersebut masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri. Padahal saat ini telah muncul Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 30 Tahun 2020 tentang kriteria teknis KPI sebagai dasar regulasi terbaru. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menilai kesesuaian lahan antara KPI dalam RTRW Kabupaten Sumedang dengan KPI berdasarkan kriteria teknis pada regulasi terbaru. Analisis kesesuaian lahan pada penelitian ini dilakukan menggunakan SIG melalui proses *overlay*. Penentuan bobot setiap parameter dilakukan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* dan pembobotan seragam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembobotan dengan metode AHP menghasilkan tingkat kesesuaian lahan yang lebih luas daripada pembobotan seragam. Hasil *intersect* antara KPI pada RTRW Kabupaten Sumedang dengan peta kesesuaian lahan KPI Butom menunjukkan bahwa dari total area seluas 2652,341 ha, 16% termasuk kelas S1 (sangat sesuai), 55% termasuk kelas S2 (sesuai), 27% termasuk kelas S3 (cukup sesuai), dan 2% termasuk kelas N1 (kurang sesuai). Tidak ditemukan lahan dengan kelas N2 (tidak sesuai) pada area KPI Butom. Hasil verifikasi industri menunjukkan bahwa 79% industri *existing* di Kawasan Butom berada di kelas yang “sangat sesuai”, 14% tergolong kelas “sesuai”, dan 7% tergolong kelas “cukup sesuai”. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa 8 dari 14 industri *existing* di Kawasan Butom telah berada dalam wilayah KPI yang tergolong kelas sesuai dan sangat sesuai.

Kata Kunci: KPI, Kawasan Butom, Kesesuaian Lahan, SIG, AHP

ABSTRACT

Butom Industrial Designation Area (KPI) is one of the KPIs located in the Rebana Region, West Java Province. The determination of KPI Butom is in accordance with Regional Regulation Number 4 of 2018 concerning the Regional Spatial Plan of Sumedang Regency 2018-2038. However, the industrial regulation in the Regional Regulation still refers to Government Regulation Number 142 of 2015 concerning Industrial Estates. Whereas currently there has been a Minister of Industry Regulation (Permenperin) Number 30 of 2020 concerning KPI technical criteria as the basis for the latest regulations. Therefore, further studies are needed to assess land suitability between KPIs in the Sumedang Regency RTRW and KPIs based on technical criteria in the latest regulation. Land suitability analysis in this study was conducted using GIS through an overlay process. Determination of the weight of each parameter was carried out using the Analytical Hierarchy Process method and uniform weighting. The results showed that weighting with the AHP method produced a broader level of land suitability than uniform weighting. The intersect results between the KPI in the Sumedang Regency RTRW and the Butom KPI land suitability map show that of the total area of 2652.341 ha, 16% belongs to class S1 (highly suitable), 55% belongs to class S2 (suitable), 27% belongs to class S3 (moderately suitable), and 2% belongs to class N1 (less suitable). No land with class N2 (unsuitable) was found in the Butom KPI area. Industry verification results show that 79% of existing industries in the Butom area are in the "highly suitable" class, 14% are in the "suitable" class, and 7% are in the "moderately suitable" class. This research also shows that 8 out of 14 existing industries in the Butom Region are already located in KPI areas classified as suitable and very suitable.

Keywords: *KPI, Butom Area, Land Suitability, GIS, AHP*